

**IMPLEMENTASI PENENTUAN KELOMPOK SASARAN PADA PROGRAM
KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KELURAHAN BULANG LINTANG
KECAMATAN BULANG KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Natasya Nurkhalita

NPP. 29.0322

Asdaf Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: natasyanurkhalita2000@gmail.com

ABSTRACT (in English)

Problem/Background (GAP): (Contains the background behind the research) The problem of poverty is a political problem because it concerns the public interest so it needs to be addressed. The research started from several problems, namely communication problems where socialization activities were slightly hampered due to the impact of the pandemic. In addition, the data provided by the database and determined by the center is considered less effective.

Objectives: to find out how the implementation of the determination of the target group of the Family Hope Program and what are the inhibiting factors and efforts that can be made.

Methods: The method used by the author in conducting applied government research research is descriptive qualitative with deductive climbing. Data and information collection using interviews and documentation. Data analysis techniques use conclusion drawing techniques from Milles and Huberman.

Results/Findings: The results showed that the Determination of the Target Group of the Family Hope Program was considered quite successful in terms of legalistic and theoretical aspects.

Conclusion: from a legalistic point of view because in the stage of determining the number and area determined by the center, validation between data and facts is carried out by the PKH Companion and the Determination of PKH KPM by the director of the Central PKH. From a theoretical point of view, in the process of determining the PKH KPM, it is slightly hampered by the communication aspect which is the impact of the Covid 19 pandemic.

Keywords: Implementation Concept, Poverty, Family Hope Program Concept

ABSTRAK (in bahasa)

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): (Berisi *background* yang melatarbelakangi penelitian) Permasalahan kemiskinan ialah merupakan masalah politik karena menyangkut kepentingan umum sehingga perlu untuk ditangani. Penelitian berawal dari adanya beberapa permasalahan yaitu masalah Komunikasi dimana kegiatan sosialisasi sedikit terhambat akibat dampak dari pandemi. Selain itu data yang diberikan oleh kedalam database dan ditentukan oleh pusat dinilai kurang efektif. **Tujuan:** untuk mengetahui bagaimana implementasi penentuan kelompok sasaran Program Keluarga Harapan serta apa saja yang menjadi faktor Penghambat dan upaya yang dapat dilakukan. **Metode:** Metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian riset terapan pemerintahan ialah deskriptif kualitatif dengan pendekatan deduktif. Pengumpulan data serta informasi menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik penarikan kesimpulan dari Milles and Huberman. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penentuan Kelompok Sasaran Program Keluarga Harapan dinilai cukup berhasil dari segi legalistic dan segi teoristik. **Kesimpulan:** dari segi legalistik karena dalam tahapan penentuan jumlah dan wilayah ditentukan oleh pusat, validasi antara data dan fakta dilaksanakan oleh Pendamping PKH dan Penetapan KPM PKH oleh direktur PKH Pusat. Dari segi teoristik, dalam proses Penentuan KPM PKH sedikit terhambat pada aspek komunikasi yang merupakan dampak dari pandemi *Covid 19*.

Kata Kunci: Konsep Implementasi, Kemiskinan, Konsep Program Keluarga Harapan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keterkaitan antara kesejahteraan dengan politik sangat erat karena keberadaan politik di lingkungan, masyarakatlah yang membantu pemerintah dalam melaksanakan programnya. Pelaksanaan politik yang etis sangat mendukung pelayanan pemerintah yang memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang sudah menjadi hak umum setiap manusia dan upaya pemberian perlindungan sosial sebagai perwujudan dari pemenuhan hak dasar manusia. Namun hal tersebut masih kurang terealisasi di negara ini mengingat besarnya angka kemiskinan di Indonesia yang mencapai angka 27,54 juta jiwa pada bulan maret tahun 2021 (Fika Nurul Ulya). Wilayah geografis kota Batam yang terdiri dari pulau-pulau kecil dan 90% wilayahnya berupa perairan menjadi penyebab banyaknya masyarakat yang belum terpenuhi kesejahteraan social dan kehidupan yang layak terutama masyarakat yang berdomisili di pulau-

pulau kecil. Pertumbuhan penduduk di kota Batam yang terus naik dan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda penurunan. Hal yang dikhawatirkan dari permasalahan tersebut semakin tinggi jumlah penduduk maka tingkat kemiskinan juga akan semakin besar.

1.2 Kesenjangan Masalah Yang Diambil (GAP Penelitian)

Kelurahan Bulang Lintang termasuk daerah *hinterland* yang wilayah dominannya adalah lautan. Susahnya akses transportasi menyebrang antar pulau menjadi momok masyarakat miskin karena tidak semua keluarga memiliki alat transportasi laut seperti sampan dan *speed boat*. Contoh nyata dari kasus sulitnya masyarakat pesisir di Kelurahan Bulang Lintang untuk mendapatkan akses kesehatan dengan mudah yaitu untuk mendapatkan pemeriksaan rutin bagi ibu hamil dan lansia serta pasien dengan penyakit lainnya, masyarakat di Kelurahan Bulang Lintang masih harus menyebrang antar pulau. Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Kelurahan Bulang Lintang, penerima bantuan PKH di Kelurahan Bulang Lintang terhitung sudah cukup banyak. Dari 21.712 keluarga penerima bantuan PKH di Kota Batam sebanyak 1.818 penerima bantuan PKH adalah masyarakat Kecamatan Bulang dan sebanyak 258 orang masyarakat sebagai KPM PKH adalah yang berdomisili di Kelurahan Bulang Lintang. Berdasarkan informasi yang peneliti dapat dari bapak Syafri selaku Ketua RT 006 Kelurahan Bulang Lintang, masih banyak kasus keluarga miskin yang belum terdaftar di DTKS tidak menjadi penerima manfaat PKH.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah pedoman yang dijadikan untuk penelitian selanjutnya dengan bahasan yang menyerupai maupun relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan dan perbandingan sebagai perbaikan kedepannya. Penelitian pertama Alfath Shafar Muhammad (2021) pelaksanaan sosialisasi dari program kerja keluarga harapan di Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari sudah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah setempat kemudian dilakukannya pendampingan pada saat program keluarga harapan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan serta peningkatan keluarga sejahtera belum sepenuhnya terjadi di Kecamatan Wua-Wua. Penelitian kedua oleh Bagas Yogaswara Pratama (2021) penanggulangan yang dilakukan oleh Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang dalam mengatasi kemiskinan dinilai efektif mengurangi tingkat kemiskinan di Kota Pangkalpinang dengan menggunakan program keluarga harapan yang dibantu pengawasannya oleh

pemerintah Kecamatan Rangkul. Penelitian ketiga oleh Muhammad Rafiudin (2016) permasalahan yang muncul pada saat pelaksanaan program keluarga harapan di Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak yaitu tidak tepat sasaran sehingga masih banyak yang belum memperoleh PHK.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Dari hasil penelitian sebelumnya, peneliti menggunakan penerapan teori yang berbeda-beda, ada yang menggunakan Teori Sosialisasi, Teori Implementasi Kebijakan Van Meter & Van Horn, dan Teori Implementasi Menurut Muzmanian dan Sabatier. Pada kesempatan kali ini peneliti akan menggunakan Teori Implementasi Edward III, namun indikatornya akan peneliti persempit lagi menjadi proses Penentuan Kelompok sasaran, mulai dari penentuan jumlah dan tempat, validasi data hingga penetapan KPM PKH.

1.5 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi penentuan kelompok sasaran program keluarga harapan yang berada di Kelurahan Bulang Lintang Kecamatan Bulang Kota Batam, serta apa saja yang menjadi factor penghambat dan upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kelurahan Bulang Lintang dalam mengimplementasikan program keluarga harapan.

II. METODE

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif. Peneliti memilih metode penulisan ini dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai fakta empiris di lapangan khususnya dalam Pelaksanaan Penentuan KPM Program Keluarga Harapan di Kelurahan Bulang Lintang. Penelitian deskriptif merupakan salah satu metode yang digunakan peneliti untuk mendeskripsikan suatu atau peristiwa yang sedang terjadi, Pendekatan yang peneliti terapkan dan gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan induktif. Berpikir induktif didasarkan pada fakta-fakta tertentu. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan 10 orang informan yaitu Kepala Dinas Sosial Kota Batam, Koordinator PKH Kota Batam, Kepala seksi perlindungan dan jaminan sosial, Pendamping PKH Kelurahan Bulang Lintang, Lurah Bulang Lintang, Ketua Kelompok PKH Bulang Lintang dan 3 orang peserta PKH/RTSM.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 2020 jumlah PMKS di Kota Batam didominasi oleh pekerja migran yang meningkat signifikan selama masa pandemi. Peningkatan jumlah PMKS ini juga disebabkan karena letak Kota Batam yang strategis sehingga menjadi daya tarik sendiri bagi para pendatang untuk mencari kerja baik yang mempunyai keahlian maupun tidak mempunyai keahlian khusus. Pendatang yang tidak memiliki keahlian khusus cenderung akan menambah jumlah PMKS di Kota Batam. Selain itu jumlah anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah pada tahun 2020 meningkat dua kali lipat yaitu menjadi 123 anak.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan pemerintah tersebut, salah satu program yang menjadi fokus magang yang diambil peneliti ialah Program Keluarga Harapan (PKH). Adapun data jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Batam Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 1
Data Validasi Peserta PKH Kota Batam 2021

DATA VALIDASI 2021				
NO	NAMA KECAMATAN	DATA AWAL	DATA ELIGIBLE	NON ELIGIBLE
1	BATAM KOTA	600	296	304
2	BATU AJI	1186	792	394
3	BATU AMPAR	445	279	166
4	BELAKANG PADANG	246	191	55
5	BENGGONG	1076	391	685
6	BULANG	163	95	68
7	GALANG	145	99	46
8	LUBUK BAJA	459	253	206
9	NONGSA	313	159	154
10	SAGULUNG	2182	1076	1106
11	SEI BEDUK	915	457	458
12	SEKUPANG	942	555	387
	Grand Total	8672	4643	4029

Sumber: Administrasi Pangkalan Data PKH kota Batam, 2021

Data diatas merupakan data hasil validasi KPM PKH tahun 2021 yang mana dari sekian calon yang terdaftar sejumlah 4.643 peserta menjadi penerima PKH. Di kecamatan Bulang sendiri KPM PKH sebanyak 95 KK yang memenuhi syarat sebagai KPM PKH. Adapun di Kelurahan Bulang Lintang sebanyak 227 jiwa

3.1 Analisis Fokus Penelitian dari Perspektif Legalistik

Adanya PKH sebagai Kebijakan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti melalui dinas terkait menjadi sebuah peluang bagi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dalam pengembangan pelayanan sosial didukung dengan optimalisasi anggaran belanjadaerah melalui penyusunan *roadmap* indikasi program, kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam. Dalam tahapan penentuan Calon KPM PKH atau biasa disebut dengan CKPM PKH yang mana menjadi pokok pembahasan peneliti dalam menyelesaikan Skripsi, ada beberapa tahap yang harus dilaksanakan. CKPM PKH adalah masyarakat miskin yang sudah terdaftar di DTKS sebagai masyarakat yang kurang mampu atau dengan kata lain menjadi masyarakat miskin. Adapun tahapan dalam mendapatkan Program Keluarga Harapan adalah sebagai berikut:

3.1.1 Perencanaan

komponen penerima bantuan yaitu berfokus pada masyarakat miskin yang mana penentuan antara jumlah peserta dan lokasi ditentukan oleh pusat. CKPM yang sudah terdaftar sebagai masyarakat miskin di data DTKS maka akan memiliki hak dan kesempatan untuk di input namanya sebagai calon kepesertaan PKH yang mana nantinya akan diberikan bantuan.

3.1.2 Penetapan CKPM

Penentuan KPM PKH adalah tim Koordinasi PKH pusat atau biasa disebut direktur PKH sesuai dengan Permensos No 1 tahun 2018 pasal 34. Nama yang sudah lolos seleksi pusat sebagai CKPM PKH akan diberikan kepada koordinator PKH tingkat Provinsi untuk kemudian akan diteruskan kepada Koordinator Tingkat Kota atau Kabupaten. Data CKPM PKH yang sudah diberikan kepada Koordinator masing-masing Kota/Kabupaten untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh Pendamping PKH masing-masing kecamatan.

3.1.3 Validasi Data dan Fakta Terkini

Apabila sudah dilaksanakan mekanisme seperti yang sudah diatur dalam Permensos No 1 Tahun 2018 pasal 35 tentang Penentuan Kepesertaan KPM PKH maka selanjutnya akan dikirim lagi oleh Administrator Pangkalan Data PKH kepada Kementerian Sosial untuk selanjutnya mendapatkan keputusan Kepesertaan PKH apakah CKPM tersebut layak atau tidak menjadi peserta atau selanjutnya disebut KPM PKH (Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan). Pada tahap akhir penentuan kepesertaan PKH, dilakukan validasi dan

verifikasi data. Dari Proses validasi CKPM PKH akan di wawancara mengenai pendapatan serta ditinjau langsung juga terkait Aset yang dimiliki. Proses tersebut akan menghasilkan CKPM yang *eligible* dan *non-eligible* (sesuai komponen dan tidak memiliki komponen).

3.1.4 Penentuan PKM

kegiatan seleksi ini tetap dilakukan sesuai prosedur. Pandemi tidaklah menjadi alasan dan penghalang untuk tetap menjalankan Program sesuai dengan SOP yang ada, yang berubah hanyalah cara pengumpulan informasinya saja. Jika dulu dengan mengumpulkan CKPM PKH sekarang lebih individu agar tidak adanya kerumunan sebagai pencegahan pemutusan mata rantai Covid 19.

3.2 Analisis Fokus Penelitian Dari Perspektif Teoritis

Dalam upaya analisis penelitian yang peneliti ambil dari perspektif teoretis, peneliti menggunakan konsep implementasi dari Goerge Edwards III. Dalam (Ali 2017:131) dijelaskan bahwa konsep Implementasi Edwards III tersebut terdapat 4 (empat) variabel yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi, diantaranya adalah sebagai berikut:

3.2.1 Analisis Komunikasi

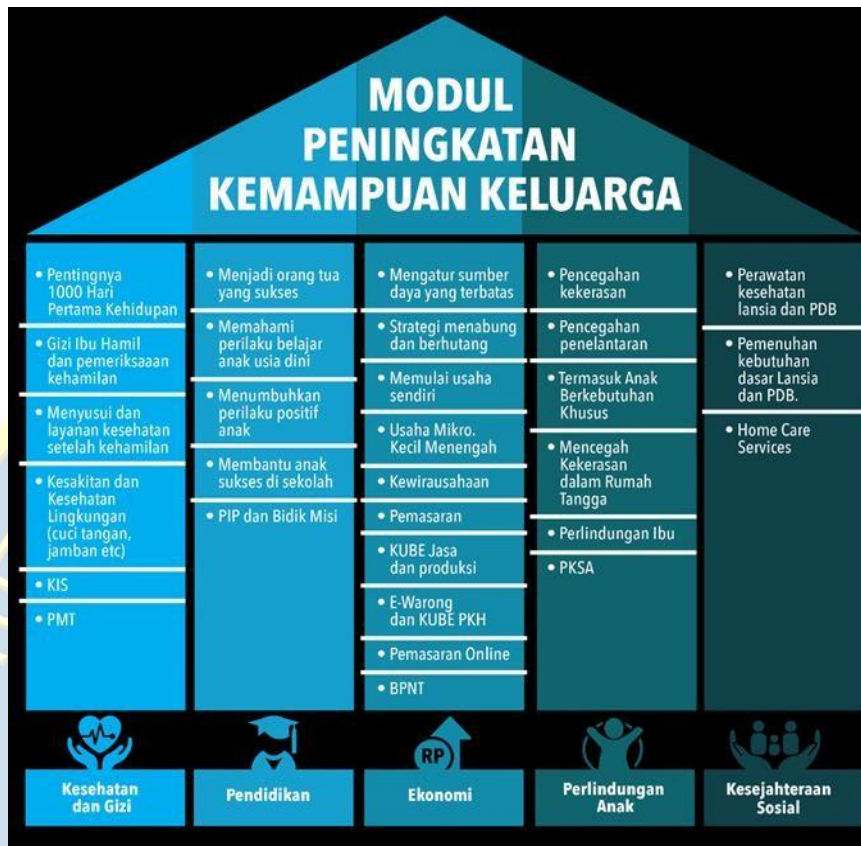
Berdasarkan data yang peneliti dapatkan langsung dilapangan, untuk menuju kepada proses Sosialisasi berupa Sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) ada beberapa tahapan yang dilakukan. Pada umumnya, untuk kepesertaan PKH sendiri, Calon Keluarga Penerima Manfaat (CKPM) sudah terdata secara terpusat yang diproses oleh Kementerian Sosial.

3.2.2 Analisis Sikap dan Komitmen Pelaksana Program (Disposisi)

Pendampingan dilakukan pada Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau *Family Development Session* (FDS). Didalam pertemuan tersebut dilakukan pendampingan bijak dalam penggunaan dana. Melalui modul pembelajaran yang diharapkan mampu meningkatkan keluarga dalam segala aspek terutama kesehatan, pendidikan, serta perekonomian di dalam keluarga. Adapun modul pembelajaran P2K2 sebagai gambar berikut;

Gambar 1

Modul Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga



Sumber : Pedoman Pelaksanaan PKH 2019

Terselenggaranya kegiatan pendampingan juga ikut turut dipantau oleh pihak Kelurahan bahwa benar kegiatan pendampingan dilakukan rutin pada tiap bulannya.

3.2.3 Ketersediaan Sumber Daya

sumber daya utama dalam implementasi program adalah sumber daya manusia. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial juga menjadi unsur penting dalam keberhasilan implementasi suatu program. Namun untuk sumber daya finansial untuk Program ini sudah ditangani dengan baik dikarenakan anggaran yang diluncurkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah langsung dari APBN. Dengan kata lain, pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang ada di daerah bergantung pada Sumber Daya Manusia.

3.2.4 Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi dari PKH merupakan salah satu struktur kelembagaan yang terbilang cukup jelas. Susunan jajaran dari pengurus atau Koordinator PKH merupakan jajaran tersendiri yang

direkrut dan dibentuk dibawah Naungan Mentri Sosial.

3.3 Faktor Penghambat Dalam Menentukan Pelaksanaan Program

Proses vertifikasi antara kesesuaian data dan fakta lapangan setidaknya dilaksanakan pertiga bulan sekali mengingat wilayah Kelurahan Bulang yang jauh. Adapun faktornya yaitu:

- a. Penentuan Kelompok Sasaran Oleh Pusat Kurang Efektif
- b. Sering terjadi kesalahpahaman
- c. Penyalahgunaan Dana Bantuan

3.4 Upaya Tim coordinator PKH dalam Mengatasi Faktor Penghambat

Ada beberapa upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan, antara lain:

- a. Pengajuan Ulang Data CKPM
- b. Pendekatan dengan masyarakat setempat untuk mengatasi masalah kesalahpahaman
- c. Penangguhan pencairan dana bantuan dengan harapan meningkatkan kesadaran komitmen KPM PKH

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

perbedaan penelitian terdahulu yang pertama oleh Alfth Shafar Muhammad (2021) dikatakan bahwa dilaksanakan sosiliasi untuk menjalankan program keluarga harapan telah berjalan dengan baik dan tepat sasaran, kemudian peneliti menemukan suatu permasalahan yaitu tidak tepat sarasanya di Kelurahan Bulan Lintang. Penelitian kedua oleh Bagas Yogaswara Pratama (2021) penanggulangan penangan Program Keluarga Harapan di Kota Pangkalpinang dinilai efekti dalam pelaksanaannya, penemuan peneliti saat penelitian yaitu program PKH di Kelurahan Bulang Lintang juga dinilai cukup efektif dalam pelaksanaannya. Penelitian ketiga oleh Muhammad Rafiudin (2016) permasalahan yang muncul di Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak yaitu tidak tepat sasaran dan ditemukan hal yang sama terjadi juga di Kelurahan Bulang Lintang yang dinilai masih terdapat bantuan-bantuan untuk program PKH yang tidak sesuai sasaran dan menyebabkan tidak meningkatnya keberhasilan program tersebut di Kelurahan Bulang Lintang.

IV. KESIMPULAN

Validasi antara data dan fakta kondisi terkini dilaksanakan oleh Pendamping PKH kelurahan. Kemudian data tersebut di input pada *database* PKH, Terpilihnya CKPM menjadi KPM ditentukan oleh pusat dinilai kurang efektif karena direktur pusat tidak mengetahui kondisi langsung dilapangan. sedangkan dari perspektif teoritis berdasarkan teori Implementasi menurut Edward III sudah cukup baik namun belum terlaksana dengan maksimal. Dari 4 Dimensi yang ada ditemukan kendala pada dimensi Komunikasi yang mana kegiatan sosialisasi sedikit terhambat karena adanya pandemi. Kemudian terdapat faktor kendala dalam kelompok sasaran PKH pada proses penentuan KPM PKH yaitu, database yang ditentukan pusat kurang efektif, sering terjadi kesalahpahaman, serta penyalahgunaan dana bantuan. adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang ada yaitu dilakukan pengajuan ulang ketidaklayakan kepesertaan PKH untuk selanjutnya KPM tersebut akan graduasi dari kepesertaan, selanjutnya memberikan pemahaman dengan melakukan pendekatan melalui ketua kelompok agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, dan memberikan efek jera berupa penangguhan pencairan dana kepada KPM PKH.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni waktu yang dimiliki dalam pelaksanaan penelitian terbatas hanya 14 hari.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis mengharapkan agar dengan adanya penelitian ini dapat membantu pemerintah Kota Batam, khususnya Kelurahan Bulang Lintang untuk dapat mengatasi masalah Program Keluarga Harapan sehingga dapat tepat sasaran dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama kepada Kepala Dinas Sosial Kota Batam yang telah membantu dalam memberikan arahan dan masukan serta informasi yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih juga kepada Lurah Kelurahan Bulang Lintang yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, serta seluruh pihak yang membantu selama pelaksanaan penelitian ini berlangsung.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, John W. 2012. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Martono, Nanang. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT RayaGrafindo Persada.
- Nurdin, Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Rohman, Arif. 2009. *Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: Mediatama.Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung. Bandung: PT
- Suryawati. 2004. *Teori Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: Jarnasi. Wibawa, Samodra. 1994. *Kebijakan Publik Proses Dan Analisis*,
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir*
- Miskin.*
- Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program PercepatanPenanggulangan Kemiskinan.*
- Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.*
- Fika Nurul Ulya. 2021. “<https://Money.Kompas.Com/Read/2021/07/15/143633326/Bps-Ada-2754-Juta-Penduduk-Miskin-Di-Indonesia-Hingga-Maret-2021?Page=all>,” 2021.
- Idris, Muhammad. 2020. “<https://Money.Kompas.Com/Read/2021/07/15/143633326/Bps-Ada-2754-Juta-Penduduk-Miskin-Di-Indonesia-Hingga-Maret-2021?Page=all>,” 2020.